

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Usaha Kecil Menengah

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi, baik di tingkat nasional maupun lokal. Dalam hal angka, UKM memberikan sumbangan yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, mencapai sekitar 60%. Selain itu, sektor UKM menyediakan lapangan kerja untuk sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional, yang menunjukkan bahwa UKM menjadi penggerak utama dalam penciptaan pekerjaan di Indonesia. Kontribusi ini sangat penting untuk menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, UKM tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi kecil, tetapi juga menjadi pilar penting dalam struktur ekonomi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain perannya dalam perekonomian, UKM juga berfungsi sebagai agen inovasi dan diversifikasi ekonomi di tingkat lokal. UKM dikenal memiliki fleksibilitas tinggi dan kemampuan untuk cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan perkembangan teknologi baru. Kemampuan ini memungkinkan UKM untuk terus berinovasi dalam produk dan proses bisnis, sehingga mendukung kesehatan dan keberlanjutan ekonomi lokal. Inovasi yang dihasilkan oleh UKM tidak hanya meningkatkan daya saing produk, tetapi juga menambah variasi produk yang ada di pasar, memberi lebih banyak pilihan bagi konsumen. Dengan cara ini, UKM berkontribusi memperkuat ekonomi lokal melalui diversifikasi usaha yang dapat memenuhi kebutuhan dan kesempatan pasar yang terus berubah.

Lebih jauh lagi, UKM memainkan peran strategis dalam mengurangi kemiskinan dengan menyediakan peluang usaha dan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Dengan adanya UKM, masyarakat lokal bisa ikut serta dalam aktivitas ekonomi, yang secara langsung meningkatkan penghasilan dan taraf hidup mereka. UKM seringkali menjadi sumber utama pendapatan bagi keluarga dan komunitas di berbagai daerah, khususnya di pedesaan dan daerah yang kurang berkembang.

Oleh karena itu, pengembangan UKM berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat serta membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah.

Secara keseluruhan, UKM berfungsi sebagai penggerak utama ekonomi nasional dengan sumbangan yang signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, serta sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan dan pengembangan UKM adalah kunci untuk terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan dapat menjawab tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi negara. Oleh karena itu, perhatian dan dukungan yang cukup terhadap UKM sangat diperlukan untuk memastikan sektor ini terus berkembang dan memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.1.1 Defenisi Serta Fungsi Bank

Bank didefinisikan sebagai institusi keuangan dimana uang dikumpulkan dan disalurkan kembali kepada masyarakat, serta menyediakan layanan perbankan lain. Sementara itu, lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang beroperasi di bidang keuangan, baik yang hanya mengumpulkan dana, hanya menyalurkan dana, atau melakukan kedua-duanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank didefinisikan sebagai suatu institusi yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dapat juga disimpulkan bahwa bank bertindak sebagai perantara keuangan antara individu yang memiliki kelebihan dana dengan mereka yang membutuhkan dana. Individu dengan kelebihan dana adalah mereka yang menyimpan uang di bank atau berinvestasi menggunakan dana mereka di bank. Uang yang disimpan di bank aman dari kehilangan atau kerusakan. Penyimpanan uang di bank tidak hanya aman tetapi juga dapat menghasilkan bunga dari simpanan tersebut. Bank akan

mendistribusikan kembali uang simpanan masyarakat kepada mereka yang memerlukan dana.

Bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk usaha atau kebutuhan sehari-hari, mereka dapat mengajukan pinjaman di bank. Untuk dapat memperoleh pinjaman, mereka harus memenuhi berbagai syarat yang ditentukan. Peminjam juga akan dikenakan bunga dan biaya administrasi yang jumlahnya bervariasi tergantung kebijakan masing-masing bank.

Aliran uang dari masyarakat ke bank dan kembali lagi kepada masyarakat, dengan bank berfungsi sebagai perantara, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Individu atau nasabah yang memiliki lebih banyak uang akan menaruh dananya di bank dalam bentuk simpanan, seperti Giro, Tabungan, atau Deposito. Bagi bank, uang yang disimpan oleh masyarakat dianggap sebagai pembelian dana. Dalam hal ini, nasabah merupakan penyimpan, sedangkan bank bertindak sebagai penerima simpanan. Nasabah memiliki pilihan untuk menentukan bentuk simpanan, baik itu Giro, Tabungan, maupun Deposito.
2. Nasabah yang menyimpan uang akan mendapatkan imbalan dari bank berupa bunga dalam bank konvensional, atau bagi hasil dalam bank yang menggunakan prinsip syariah. Besar kecilnya imbalan ini tergantung pada jumlah uang yang disimpan serta faktor lainnya.
3. Dana yang disimpan oleh nasabah di bank akan disalurkan kembali oleh bank kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit.
4. Masyarakat yang menerima pinjaman dari bank harus mengembalikan dana tersebut beserta bunga sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara bank dan nasabah. Untuk bank yang mengikuti prinsip syariah, pengembalian pinjaman dilakukan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan hukum Islam.

Sebagai perantara keuangan, bank memperoleh keuntungan dari selisih antara bunga yang dibayarkan kepada penyimpan (bunga simpanan) dan bunga yang diterima dari peminjam (bunga kredit). Keuntungan ini disebut sebagai *Spread*

Based, yang merupakan jenis keuntungan untuk bank konvensional. Sementara itu, pada bank syariah, istilah bunga tidak digunakan karena bunga dianggap haram. Di bank syariah, hasilnya didapat dari bagi hasil atau *Profit sharing*.

Selain hasil dari *spread*, bank juga memperoleh hasil dari layanan-layanan lain. Layanan ini biasanya dikenakan biaya yang mencakup biaya pengiriman, biaya tagihan, biaya administrasi, biaya provisi, komisi, biaya iuran, sewa, dan lain-lain. Hasil dari biaya-biaya tersebut dikenal sebagai *fee based* (Dewi, 2022)

Dalam praktik, ada beberapa jenis bank. Jika dilihat dari fungsinya, bank dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Bank Sentral
2. Bank Umum
3. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Sentral adalah lembaga yang mengatur berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perbankan dan keuangan di suatu negara. Di setiap negara, ada satu bank sentral yang didukung oleh cabang-cabangnya. Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) berperan sebagai bank sentral. Fungsi Bank Indonesia meliputi bank sirkulasi, bank untuk bank lain, serta sebagai *lender of the last resort*.

Sebagai Bank sirkulasi, Bank Indonesia bertugas mengawasi peredaran uang di negara. Sebagai bank untuk bank lain, ia mengatur sistem perbankan nasional. Fungsi sebagai *lender of the last resort* menunjukkan perannya sebagai tempat peminjaman terakhir.

Layanan Bank Indonesia lebih banyak diarahkan kepada pemerintah dan institusi perbankan. Dengan kata lain, nasabah utama Bank Indonesia adalah lembaga perbankan itu sendiri.

Tujuan utama Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral memiliki tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur serta memastikan kelancaran sistem devisa, dan mengatur serta mengawasi bank-bank yang ada.

Bank umum adalah lembaga yang memiliki tugas memberikan berbagai layanan perbankan kepada semua kalangan masyarakat, baik individu maupun

institusi. Bank ini sering disebut bank komersial dan dibagi menjadi dua kategori, yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa. Bank umum yang berstatus devisa menawarkan lebih banyak produk dibandingkan dengan yang non devisa. Bank devisa dapat memberikan layanan terkait semua jenis mata uang asing serta layanan perbankan internasional, sedangkan bank non devisa tidak dapat melakukan layanan tersebut. (Pratama, 2024)

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini, ada berbagai jenis perbankan yang diatur oleh Undang-Undang Perbankan. Jika kita membandingkan jenis perbankan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 sebelumnya, kita akan menemukan beberapa perbedaan. Namun, fungsi utama bank sebagai lembaga keuangan yang mengumpulkan uang dari masyarakat dan menyalurkannya tetap sama.

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari fungsi serta kepemilikan mereka. Dari segi fungsi, perbedaannya terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang bisa ditawarkan, serta wilayah operasional. Sementara itu, untuk kepemilikan, hal ini terlihat dari kepemilikan saham yang ada.

Perbedaan lainnya dapat dilihat dari siapa saja nasabah yang dilayani, apakah kalangan umum atau masyarakat tertentu dalam satu lokasi, seperti kecamatan. Jenis perbankan juga dibedakan berdasarkan cara mereka menentukan harga jual dan beli, atau dengan kata lain, metode untuk mendapatkan keuntungan.

2.1.2 Pengertian dan Jenis Kredit

Pada dasarnya, pemberian kredit berlandaskan pada kepercayaan, yang berarti bahwa pemberian kredit adalah bentuk kepercayaan dari bank sebagai pemberi kredit, di mana prestasi yang diberikan dianggap akan dibayar kembali oleh penerima kredit sesuai dengan syarat yang telah disepakati bersama (kasmir, 2016)

Adapun pengertian Jenis Kredit ada terdapat banyak pendapat mengenai definisi kredit dari berbagai ahli, tetapi semua pendapat tersebut memiliki satu kesamaan, yaitu mengenai kepercayaan. Secara etimologis, kredit berarti

"percaya", karena pihak yang menerima kredit pada dasarnya adalah pihak yang mendapatkan kepercayaan. Seiring berjalannya waktu, makna kata kredit telah beralih menjadi pinjaman. Dimana kreditur memberikan pinjaman kepada debitur pada waktu yang telah ditentukan, dan akan dibayar kembali dengan tambahan imbalan tertentu.

Kredit juga mencakup pemahaman tentang pergeseran antara waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Oleh karena itu, kredit dijelaskan sebagai hak untuk memanfaatkan uang dalam jangka waktu tertentu berdasarkan alasan tertentu. Dalam asal katanya, kredit berasal dari kata Yunani "*Credere*", yang artinya kepercayaan. Selanjutnya, kredit dijelaskan sebagai suatu penyerahan kepercayaan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, yang hasilnya akan dikembalikan pada waktu yang telah ditetapkan dengan imbalan berupa bunga.

Berdasarkan definisi kredit yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal penting dalam memberikan kredit:

- a. Kepercayaan adalah keyakinan pemberi kredit, dalam hal ini bahwa dana yang sudah diberikan akan dikembalikan oleh penerima kredit di masa mendatang.
- b. Waktu merujuk pada periode antara pemberian dana dan pengembaliannya. Pada aspek ini, terdapat konsep nilai waktu uang, di mana nilai uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang di masa depan.
- c. Risiko adalah kemungkinan masalah yang dapat muncul dari pemberian kredit. Untuk meminimalkan risiko tersebut, perlu diadakan penilaian yang cermat sebelum kredit disetujui, dengan pengamanan melalui agunan untuk melindungi kreditur.
- d. Prestasi dalam konteks kredit berarti uang yang diberikan.

Menurut (Sari, 2020) Kredit bisa dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

1. Dari sisi pemberi dan penerima kredit terkait dengan pelaksanaan kredit di Indonesia, jenis kredit meliputi:

- a. Kredit perbankan yang diberikan kepada masyarakat untuk tujuan usaha atau konsumsi. Kredit ini disalurkan oleh Bank Pemerintah atau bank swasta untuk membantu dunia usaha dan juga diberikan kepada individu untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa.
- b. Kredit likuiditas adalah kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang kemudian digunakan untuk mendukung aktivitas kredit mereka. Pemberian kredit ini merupakan bagian dari tugas Bank Indonesia untuk meningkatkan kegiatan kredit serta melakukan pengawasan terhadapnya.
- c. Dengan demikian, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan batasan kuantitatif dan kualitatif dalam sektor perbankan.
- d. Kredit langsung, ini adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintahan, contohnya Bank Indonesia memberikan kredit kepada Bulog untuk program pengadaan pangan, atau kepada Pertamina serta pihak lainnya.

2. Dari segi penggunaan kredit, jenis kredit terbagi menjadi:

- a. Kredit konsumtif yang diberikan oleh bank bagi individu untuk kebutuhan sehari-hari.
- b. Kredit produktif, termasuk kredit investasi dan kredit eksploitasi.

Kredit investasi ditujukan untuk pembiayaan modal tetap seperti peralatan produksi, gedung, dan mesin, serta untuk rehabilitasi dan ekspansi. Jangka waktu kredit ini biasanya lima tahun atau lebih. Di Indonesia, jenis kredit ini mulai dikenal sejak pertengahan tahun 1969 ketika Program Repelita I diluncurkan untuk mendukung industrialisasi pemerintah.

Kredit eksploitasi ditujukan untuk pendanaan kebutuhan modal kerja dalam usaha, meliputi persediaan bahan baku, produk akhir, barang

dalam proses, dan piutang, dengan jangka waktu yang pendek. Kredit jenis ini sudah ada sejak tahun 1950-an.

Kombinasi antara kredit konsumtif dan kredit produktif (setengah konsumtif dan setengah produktif).

3. Dari isi dokumen, kredit jenis ini sangat terkait dengan.

Dokumen-dokumen penting yang memiliki nilai uang sebagai penggantinya, berfungsi sebagai jaminan utama dalam pemberian pinjaman. Pinjaman ini sering digunakan oleh individu yang melakukan transaksi perdagangan di tempat yang berbeda. Terdapat beberapa jenis pinjaman ini, antara lain:

- a. Kredit ekspor mencakup semua jenis pinjaman yang memberikan dukungan finansial untuk kegiatan ekspor. Ini bisa berupa pinjaman langsung atau tidak langsung, seperti dana untuk modal kerja jangka pendek atau investasi untuk industri yang berfokus pada ekspor.
- b. Kredit impor.

4. Dalam hal ukuran dan besarnya aktivitas usaha, yaitu dengan melihat dinamika dari sektor yang ditekuni, aset yang dimiliki, dan hal-hal lainnya, jenis kredit ini terdiri dari:

- a. Kredit kecil merupakan jenis kredit yang diberikan kepada pelaku usaha yang tergolong dalam kategori usaha kecil. Sejak Januari 1990, kebijakan yang berlaku mewajibkan bank untuk menyalurkan sekitar 20% dari total portofolio kreditnya kepada sektor usaha kecil melalui program Kredit Usaha Kecil. Pemenuhan ketentuan ini juga dijadikan sebagai salah satu indikator dalam menilai tingkat kesehatan bank. Usaha kecil sendiri didefinisikan sebagai kegiatan usaha yang memiliki aset, di luar tanah dan bangunan tempat usaha, tidak melebihi Rp600 juta. Sementara itu, batas maksimum kredit yang dapat diberikan kepada usaha kecil pada saat itu adalah Rp200 juta. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui

deregulasi pada Mei 1993, yang menaikkan batas maksimum kredit kecil menjadi Rp250 juta.

- b. Jenis kredit ini dipandang sebagai salah satu instrumen utama pemerintah Indonesia dalam mendorong pemerataan ekonomi, khususnya setelah diberlakukannya kebijakan pada tahun 1990. Seiring dengan kebijakan tersebut, program Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) kemudian dihapuskan. Penerapan Kredit Usaha Kecil (KUK) bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dan setara bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha.
- c. Kredit menengah, yang ditujukan untuk pelaku usaha dengan aset lebih dari kategori pelaku usaha kecil.
- d. Kredit besar.

5. Dari sudut pandang waktu, jenis kredit dibedakan menjadi:

- a. Kredit jangka pendek (*short term loan*), yang memiliki jangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya bisa berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembelian, dan kredit wesel.
- b. Kredit jangka menengah (*medium term loan*), yaitu pinjaman dengan periode waktu mulai dari 1 tahun hingga 3 tahun.
- c. Kredit jangka panjang, yang memiliki periode waktu lebih dari 3 tahun. Biasanya, kredit jangka panjang digunakan untuk investasi yang bertujuan meningkatkan dana perusahaan untuk perbaikan, ekspansi, atau pembangunan proyek baru.

6. Dalam hal jaminan, jenis kredit dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Kredit tanpa jaminan atau yang sering disebut sebagai kredit blangko (*unsecured loan*) merupakan jenis kredit yang diberikan tanpa adanya agunan dari debitur. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Tahun 1992, pemberian kredit tanpa jaminan dimungkinkan karena peraturan tersebut tidak secara tegas

mensyaratkan adanya jaminan. Namun demikian, bank tetap harus memiliki keyakinan terhadap kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Tahun 1967, yang secara jelas melarang pemberian kredit tanpa jaminan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan bahwa bank tidak diperbolehkan memberikan kredit tanpa jaminan kepada pihak manapun.

- b. Kredit dengan jaminan (secured loan) merupakan kredit yang diberikan dengan adanya agunan sebagai bentuk keyakinan bahwa debitur mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi pinjaman. Dalam praktiknya, pemberian kredit oleh bank selalu mengandung risiko, sehingga bank perlu menerapkan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. Untuk meminimalkan risiko tersebut, bank biasanya mensyaratkan adanya jaminan dalam proses pemberian kredit. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

7. Kredit Sindikasi.

Kredit sindikasi atau pinjaman sindikasi merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan secara bersama-sama oleh dua atau lebih lembaga keuangan kepada satu debitur dengan syarat dan ketentuan yang sama. Pemberian kredit ini menggunakan dokumen perjanjian yang seragam dan pengelolaannya dilakukan oleh sebuah bank agen. Proses pengaturan kredit sindikasi biasanya dikoordinasikan oleh pihak pengatur (arranger) yang bertanggung jawab sejak tahap pengajuan pinjaman oleh nasabah hingga proses penandatanganan perjanjian kredit (Kasmir, 2016).

2.2 Kontribusi Bank ke Usaha Kecil Menengah

Kontribusi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sangat penting bagi Bank Danamon, terutama untuk mendukung keberhasilan bank dalam menjalankan fungsi sosial ekonomi dan meningkatkan portofolio kreditnya. Dalam hal ini, UKM

bukan hanya menjadi salah satu target pasar yang strategis bagi Bank Danamon, tetapi juga berperan langsung dalam pertumbuhan dan stabilitas bisnis bank.

Beberapa aspek penting yang terkait akan menjelaskan rincian kontribusi UKM terhadap Bank Danamon.

Pertama, UKM adalah segmen pasar yang sangat penting bagi Bank Danamon dalam melaksanakan berbagai program kredit dan produk perbankan lainnya. Bank Danamon aktif memberikan kredit lunak dan berbagai jenis fasilitas keuangan untuk pelaku UKM dengan tujuan mendorong perkembangan usaha mereka. Pemberian kredit ini tidak hanya meningkatkan total kredit yang dikeluarkan oleh bank, tetapi juga memperluas akses layanan perbankan ke sektor ekonomi riil yang ada di berbagai daerah, terutama di Medan dan sekitarnya. Dengan cara ini, Bank Danamon bisa mencapai pasar yang lebih luas dan bervariasi, yang akhirnya menambah pendapatan bank dari bunga pinjaman serta biaya administrasi. Ini membuktikan bahwa UKM adalah salah satu pendorong utama dalam peningkatan kinerja keuangan Bank Danamon.

Kedua, dukungan dari Bank Danamon untuk UKM juga membantu memperkuat citra bank sebagai lembaga keuangan yang peduli terhadap pemberdayaan usaha kecil dan menengah. UKM dianggap sebagai pilar perekonomian nasional, sehingga keterlibatan Bank Danamon dalam mendukung sektor ini memberikan tambahan nilai penting bagi reputasi bank. Melalui pemberian kredit dan layanan keuangan lainnya, Bank Danamon menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pelaku UKM. Hubungan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan dari masyarakat kepada bank, tapi juga memperkuat loyalitas nasabah yang berdampak positif pada posisi kompetitif Bank Danamon dalam industri perbankan. Jadi, peran Bank Danamon dalam mendukung UKM menunjukkan komitmennya dalam membantu pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif.

Selain dari sisi bisnis, keberhasilan Bank Danamon dalam menyalurkan kredit kepada UKM juga menambah nilai dari segi reputasi dan tanggung jawab sosial. Bank dianggap sukses menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial

untuk memberdayakan sektor usaha kecil yang selama ini kurang mendapatkan akses layanan keuangan formal. Kontribusi ini sangat penting dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena UKM adalah salah satu penggerak ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan begitu, Bank Danamon tidak hanya menjadi penyedia jasa keuangan, tetapi juga berperan sebagai agen pembangunan ekonomi yang membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam aspek manajemen risiko dan kelangsungan usaha, berhasilnya pemberian kredit kepada UKM memberikan efek positif terhadap peningkatan keseluruhan kualitas portofolio kredit di Bank Danamon. Dengan melibatkan UKM dalam diversifikasi portofolio kredit, bank mampu mengurangi potensi risiko kredit yang mungkin muncul akibat konsentrasi pada segmen tertentu. Memperluas risiko ke berbagai sektor dan tipe usaha memungkinkan Bank Danamon untuk mempertahankan stabilitas keuangannya dan meningkatkan ketahanan perusahaan saat menghadapi guncangan ekonomi. Oleh sebab itu, UKM berfungsi tidak hanya sebagai pasar yang strategis, tetapi juga sebagai fondasi penting yang membantu keberlangsungan dan perkembangan Bank Danamon dalam jangka panjang.

2.3 Peran Bank dalam mendukung Usaha Kecil Menengah

Peran bank dalam membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan sektor ini. Selain memberikan akses keuangan, peran bank juga mencakup peningkatan literasi dan kemampuan bisnis UKM melalui pelatihan dan pendampingan, yang dilakukan bersama lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Namun, ada tantangan utama yang harus dihadapi, termasuk risiko kredit yang tinggi dan kurangnya jaminan yang cukup. Tantangan ini dapat diatasi dengan penerapan inovasi teknologi dan kebijakan yang mendukung seperti penjaminan kredit dan insentif pajak (Sari, 2015)

Secara keseluruhan, peran bank sangat penting dalam mendorong pertumbuhan UKM, yang pada akhirnya memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional serta penciptaan lapangan kerja.

2.4 Prosedur Pemberian Kredit

Proses pemberian kredit di Bank Danamon menurut dilakukan melalui rangkaian tahapan yang terencana dan teratur. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis kelayakan calon debitur dan menjaga keamanan dalam penyerahan kredit.

Langkah-langkah dalam proses pemberian kredit menurut Kasmir (2016) adalah

1. Pengajuan dokumen atau proposal kredit dari calon debitur.

Pada fase ini, calon nasabah harus mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan, yang mencakup informasi tentang latar belakang perusahaan dan data pribadi. Dokumen-dokumen ini antara lain adalah Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Kartu Tanda Penduduk, dan dokumen pendukung lainnya. Dan calon debitur juga diharuskan untuk mengungkapkan alasan dan maksud pengajuan kredit, jumlah uang yang diminta, jangka waktu pengembalian, cara pelunasan kredit, serta bentuk jaminan yang ditawarkan, seperti sertifikat tanah atau bangunan. Laporan keuangan, termasuk neraca dan laporan rugi-laba, juga merupakan bagian penting dari dokumen yang harus disiapkan untuk memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan usaha.

2. Setelah semua dokumen diterima, tahap berikutnya melibatkan verifikasi dokumen oleh tim bank.

Di sini, petugas bank akan memeriksa kelengkapan dan keaslian dokumen sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua dokumen yang dimasukkan adalah sah, lengkap, dan sesuai dengan persyaratan administrasi yang berlaku. Langkah verifikasi ini sangat penting untuk menghindari risiko memberikan kredit kepada pihak yang tidak memenuhi syarat atau yang dapat menyebabkan kerugian untuk bank.

3. Setelah itu, bank akan melakukan wawancara dengan calon debitur.

Wawancara ini bertujuan untuk mengkonfirmasi keaslian data yang tercantum dalam dokumen serta mendapatkan pemahaman lebih lanjut

tentang kebutuhan dan kondisi keuangan nasabah. Melalui wawancara, petugas bank dapat menilai keseriusan dan kemampuan calon debitur dalam menjalankan usaha dan mengembalikan kredit sesuai dengan persetujuan.

4. Selanjutnya, petugas bank akan melakukan inspeksi langsung ke lokasi usaha atau objek jaminan yang diajukan.

Tujuannya adalah mencocokkan informasi dari dokumen dan wawancara dengan keadaan nyata di lapangan. Dengan melakukan pemeriksaan langsung, bank dapat menilai kelayakan usaha dan harga jaminan dengan cara yang objektif, sehingga membatasi risiko kredit macet.

Jika selama wawancara atau inspeksi ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan, bank akan melakukan wawancara tambahan untuk memperbaiki dan menambahkan dokumen yang diperlukan. Tahap ini memastikan bahwa semua data yang digunakan dalam pengambilan keputusan kredit adalah tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah semua langkah tersebut selesai dan dokumen dinyatakan sesuai dengan kriteria, bank akan melanjutkan ke proses pembuatan keputusan kredit. Pada tahap ini, bank memutuskan apakah kredit diterima atau ditolak, berapa jumlah kredit yang diberikan, periode pengembalian yang ditetapkan, serta biaya lain yang mungkin ada. Proses ini juga mencakup aspek hukum dan administratif, seperti penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan. Semua langkah ini dirancang dengan hati-hati untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan tepat sasaran, aman untuk pihak bank, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi debitur. Oleh karena itu, prosedur pemberian kredit di Bank Danamon tidak hanya tertuju pada aspek finansial, tetapi juga memperhatikan unsur hukum dan risiko untuk mendukung keberhasilan penyerahan kredit kepada nasabah UKM secara berkelanjutan.

2.5 Kendala Pemberian Kredit

Kendala dalam pemberian pinjaman kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah faktor penting yang berpengaruh pada kesuksesan pembiayaan dan perkembangan sektor UKM. Masalah ini dapat dibagi menjadi dua perspektif, yaitu

dari sisi bank sebagai pemberi pinjaman dan dari pihak UKM sebagai penerima pinjaman.

Dari perspektif bank, ada beberapa tantangan yang menghalangi penyaluran kredit kepada UKM menurut (Rahmawati, 2020)

1. Prosedur dan syarat pinjaman yang tidak diketahui luas oleh masyarakat, terutama pelaku UKM, mengakibatkan rendahnya minat dan kepercayaan dalam mengajukan pinjaman. Informasi yang minim mengenai cara pengajuan pinjaman membuat UKM ragu untuk menggunakan fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh bank.
2. Kurangnya keyakinan masyarakat terhadap bank dalam pengelolaan keuangan usaha juga menjadi halangan yang signifikan. Hal ini muncul dari pandangan negatif atau pengalaman buruk sebelumnya yang membuat pelaku UKM merasa ragu untuk berhubungan dengan bank.
3. Proses peminjaman yang rumit dan lambat memberi kesan birokrasi yang sulit dan tidak efektif. Proses yang memakan waktu panjang ini mengurangi ketertarikan nasabah untuk mengajukan pinjaman atau melanjutkan prosesnya, sehingga mengakibatkan rendahnya penyaluran kredit kepada UKM.

Sementara itu, dari sudut pandang UKM sebagai nasabah, ada beberapa kendala yang menghalangi partisipasi mereka dalam program kredit yang ditawarkan oleh bank.

1. Kurangnya pemahaman mengenai tujuan dan manfaat dari pinjaman menyebabkan rendahnya ketertarikan UKM untuk mengajukan pembiayaan. Banyak pelaku UKM yang belum menyadari bagaimana pinjaman dapat dimanfaatkan secara efektif untuk perkembangan usaha, sehingga mereka enggan mengambil risiko dengan meminjam uang.
2. Suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank lain menjadi penghalang tambah yang membuat nasabah ragu untuk menggunakan fasilitas pinjaman tersebut. Tingginya bunga dianggap membebani dan bisa mengurangi keuntungan usaha mereka.

3. Adanya masalah kredit macet yang pernah terjadi menimbulkan ketidakpercayaan baik dari pihak bank maupun nasabah. Kredit macet ini tidak hanya merugikan bank secara finansial, tetapi juga menyebabkan stigma negatif yang menghalangi pemberian pinjaman selanjutnya kepada UKM.
4. Kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai proses pengajuan pinjaman membuat masyarakat kecil dan menengah tidak mau bertanya atau mencari tahu lebih lanjut mengenai prosedur dan syarat pinjaman. Ketidaktahuan ini memperkuat ketidakpercayaan terhadap sistem perbankan dan menghalangi akses UKM terhadap pembiayaan formal.

Secara keseluruhan, masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit kepada UKM dipengaruhi oleh faktor internal bank dan juga oleh pandangan dan pengetahuan nasabah mengenai layanan kredit. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif dari bank dan pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi, menyederhanakan prosedur, menurunkan suku bunga, serta memberikan pendidikan kepada pelaku UKM agar mereka lebih memahami manfaat dan cara pinjaman. Dengan cara ini, hambatan dalam pemberian pinjaman dapat diminimalisir, sehingga akses pembiayaan bagi UKM bisa meningkat dan berkontribusi secara maksimal dalam perkembangan sektor usaha kecil dan menengah. Penjelasan yang mendalam tentang kendala pemberian pinjaman ini sangat penting untuk dimasukkan sebagai bagian dari tinjauan pustaka atau latar belakang dalam skripsi yang membahas pembiayaan UKM.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Fokus dan Temuan Utama	Kelemahan/Kendala
1	Sari, R. (2015)	Pengaruh Pemberian Kredit terhadap Pertumbuhan UKM di Indonesia	Pengaruh positif kredit terhadap omzet dan pengembangan usaha UKM	Kendala pembayaran dan kurangnya pemahaman prosedur

2	Yuliana, S. (2018)	Pengaruh KUR terhadap Pengembangan UKM	KUR berpengaruh positif, hambatan utama sosialisasi dan prosedur kompleks	Sosialisasi dan prosedur yang rumit
3	Utami & Hidayat (2019)	Strategi Bank dalam Memberikan Kredit Lunak kepada UKM	Pentingnya kebijakan dan inovasi teknologi dalam akses kredit	Risiko kredit dan kurangnya jaminan
4	Hadi, R. (2016)	Pengaruh Suku Bunga dan Persyaratan Administrasi terhadap Minat Pengajuan Kredit UKM	Suku bunga tinggi dan persyaratan rumit mengurangi minat UKM	Kendala perbankan dalam menyalurkan kredit
5	Darma Syahrullah Ekajaya, (2023)	Analisis Pemberian Kredit pada Usaha Mikro Kecil Menengah Tanpa Agunan pada PT. Bank Danamon Tbk	Fokus penelitian adalah proses pemberian dan penyelesaian kredit mikro tanpa agunan di PT. Bank Danamon Tbk, khususnya mengenai faktor penyebab kredit bermasalah dan langkah-langkah penyelesaiannya. Temuan utama menunjukkan bahwa kredit bermasalah sering disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, dan penyelesaiannya	Kendala utama adalah tingginya risiko kredit bermasalah yang disebabkan oleh faktor internal seperti analisis kredit yang kurang tajam dan eksternal seperti kondisi perekonomian, serta keterbatasan bank dalam melakukan restrukturisasi kredit karena nilai kredit yang kecil dan risiko yang tinggi. Selain itu, proses penanganan kredit bermasalah yang lebih mengutamakan pendekatan non litigasi dapat

			dilakukan melalui penagihan intensif dan restrukturisasi kredit,serta langkah terakhir berupa penghapusan bukuan (write-off)	memunculkan kendala dalam penegakan hukum jika debitur tidak kooperatif
6	Rusman Rahman, SE, M.Si (2015)	Analisis Pemberian Kredit Modal Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kota Banda Aceh (Studi Pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk DSP Kota Banda Aceh)	Fokus penelitian adalah menganalisis pelaksanaan pemberian kredit usaha mikro oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk di Banda Aceh. Hasil menunjukkan bahwa bank telah berfungsi dalam memberikan kredit modal usaha bagi pelaku usaha mikro, tetapi pelaksanaan kredit tersebut belum optimal dan mengalami penurunan.	Pemberian kredit belum sepenuhnya optimal, dengan penurunan dalam pelaksanaannya. Saran dalam penelitian menunjukkan bahwa pemberian kredit sebaiknya disesuaikan dengan kondisi pelaku usaha mikro, termasuk tidak perlu adanya jaminan tambahan, yang mengindikasikan kendala dalam prosedur pemberian kredit
7	Adelina Histi Harianja, Jhon Andre Habeahan, Khesia Arista Br Tobing, Juita Sihombing, Triana Irawati Siregar,	Pengaruh Ukuran Bank, Efisiensi, Dana Pihak Ketiga, Dan LDR terhadap Penyaluran Kredit pada PT Bank Danamon	Mengkaji pengaruh variabel Ukuran Bank, Efisiensi, Dana Pihak Ketiga, dan LDR terhadap penyaluran kredit di Bank Danamon selama	Penelitian tidak menemukan pengaruh signifikan dari variabel yang diteliti, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model, serta

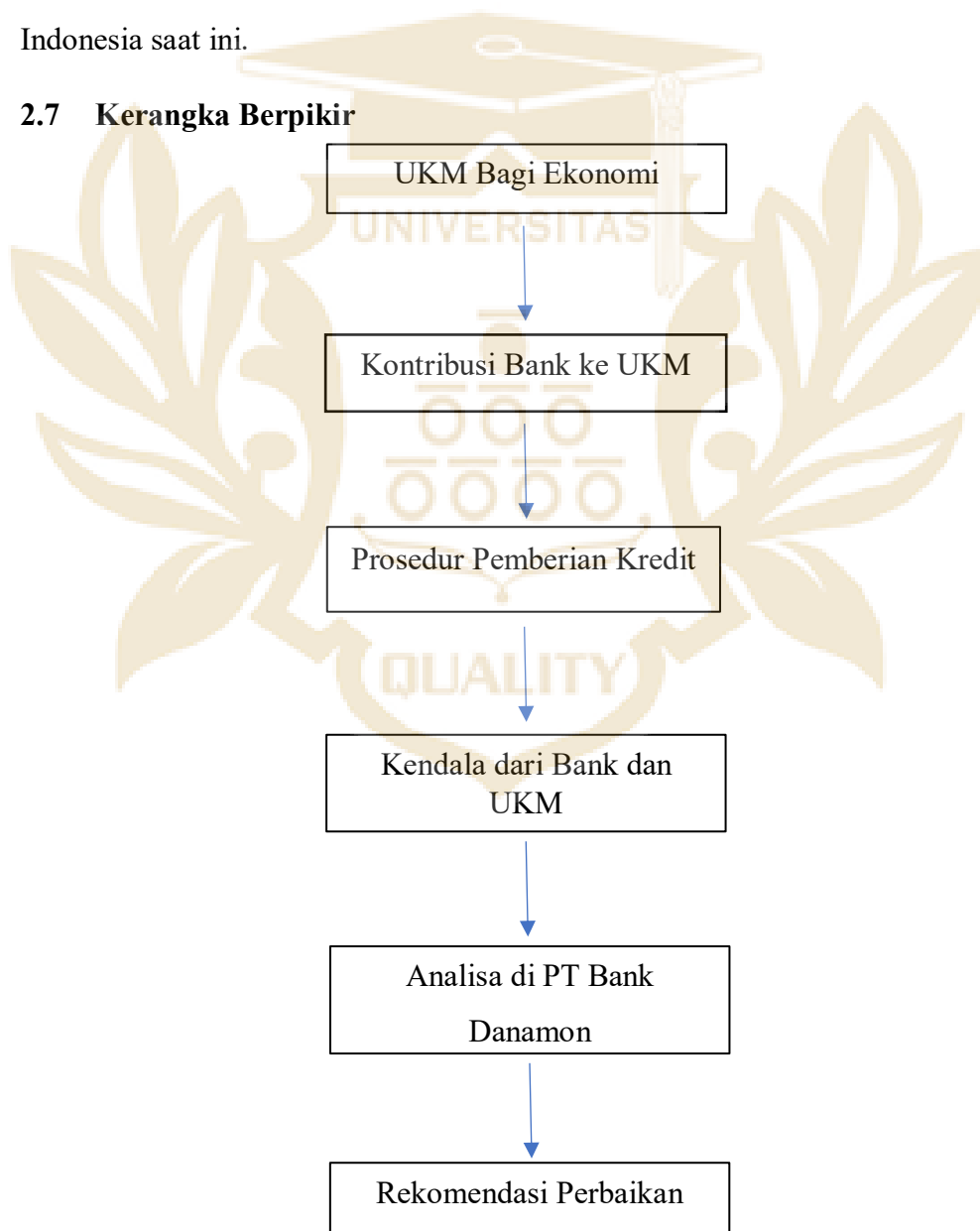
	Hamonangan Siallagan, Christnova Hasugian (2024).	Indonesia, Tbk Periode 2013-2022	periode 2013-2022. Temuan utama: Variabel-variabel tersebut tidak berkontribusi secara signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank tersebut selama waktu penelitian.	variabel lain yang mungkin lebih berpengaruh seperti <i>Return on Asset</i> (ROA), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), atau <i>Non Performing Loan</i> (NPL) tidak dianalisis. Selain itu, data bersifat kuantitatif dan mungkin tidak mampu menangkap faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penyaluran kredit secara menyeluruh.
8	Pratama, D. (2017)	Faktor Penentu Kredit UKM (Studi Kasus Bank Mandiri)	Kelengkapan berkas dan jaminan menjadi faktor penting	Risiko tinggi menyebabkan konservatisme bank
9	Yuliana, S. (2018)	Pengaruh KUR terhadap Pengembangan UKM	KUR positif, tapi sosialisasi dan prosedur kompleks	Terbatasnya perluasan program
10	Alfian, M. (2019)	Strategi Pengembangan UKM Melalui Kredit & Risiko	Pengelolaan risiko dan inovasi produk penting	Risiko default dan kurang percaya diri nasabah

Sumber : Data diolah, 2025

Perlu disampaikan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kendala utama dalam pemberian kredit kepada UKM meliputi prosedur yang rumit, kurangnya pemahaman dari pelaku UKM terhadap proses kredit, serta tantangan internal bank seperti sistem yang belum sepenuhnya efisien dan risiko kredit yang tinggi. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesamaan dalam

mengidentifikasi hambatan utama yang bersifat struktural dan non-struktural, serta pentingnya inovasi dan pendampingan dalam proses pembiayaan. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus penelitian; beberapa studi lebih menempatkan perhatian pada aspek internal bank dan risiko kredit, sementara yang lain menyoroti persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Posisi penelitian ini berbeda karena secara khusus memfokuskan pada analisis prosedur pemberian kredit dan kendala yang dihadapi secara empiris di PT Bank Danamon melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus langsung, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam dan kontekstual tentang dinamika tersebut dalam praktik perbankan Indonesia saat ini.

2.7 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, terdapat sebuah rangkaian hubungan yang secara naratif menggambarkan interaksi antara prosedur pemberian kredit, tantangan yang dihadapi, dan usaha yang dilakukan oleh PT Bank Danamon dalam memperoleh keberhasilan dalam memberikan kredit kepada UKM. Prosedur pemberian kredit yang terstruktur dan sistematis menjadi faktor utama yang menentukan seberapa efektif proses pengajuan dan pencairan kredit. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan adanya berbagai tantangan, baik dari dalam bank maupun dari nasabah UKM, yang dapat mengganggu kelancaran proses tersebut. Tantangan internal seperti lamanya waktu analisis dan keterbatasan sumber daya manusia berpotensi membuat waktu pemberian kredit lebih lama dan mengurangi efisiensi layanan. Di sisi lain, tantangan dari nasabah, seperti dokumen yang tidak lengkap dan kurangnya pemahaman tentang sistem perbankan, semakin membuat proses ini semakin rumit. Faktor eksternal, seperti keadaan ekonomi dan pandangan masyarakat terhadap bank, juga memengaruhi minat dan kepercayaan nasabah UKM dalam menggunakan layanan kredit. Secara logis, ada hubungan sebab-akibat di mana prosedur yang rumit dan tantangan yang ada bisa mengurangi efisiensi serta efektivitas pemberian kredit, sekaligus memengaruhi akses UKM terhadap sumber dana. Usaha yang dilakukan oleh PT Bank Danamon melalui digitalisasi, perubahan kebijakan, dan pelatihan keuangan bertujuan untuk mengatasi kendala ini dan meningkatkan kualitas layanan. Melalui penelusuran sistematis mengenai hubungan ini, penelitian ini ingin memahami dinamika pemberian kredit untuk UKM sehingga dapat memberikan saran yang tepat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kredit, mendukung pertumbuhan usaha UKM, serta memperluas akses keuangan secara menyeluruh.

2.8 Definisi Konsep

1. Prosedur Pemberian Kredit UKM di PT Bank Danamon

Di PT Bank Danamon, proses pemberian kredit untuk UKM terdiri dari serangkaian langkah yang telah distandarisasi dan disusun secara sistematis. Langkah-langkah ini harus dilalui oleh bank serta nasabah UKM saat mengajukan, menilai, menyetujui, dan mencairkan kredit. Prosedur ini meliputi beberapa

tahapan, seperti mengumpulkan dokumen yang diperlukan, memverifikasi data, menganalisis kelayakan usaha dan risikonya, bernegosiasi, serta menandatangani perjanjian kredit. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin bahwa proses pemberian kredit berlangsung dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebijakan bank, serta mendukung keberlangsungan usaha UKM.

2. Kendala Pemberian Kredit

Kendala dalam pemberian kredit UKM merupakan faktor-faktor yang menghambat proses penyaluran kredit dari bank kepada pelaku UKM. Kendala ini bisa berasal dari sisi internal bank maupun dari pihak pelaku UKM sendiri. Dari sisi bank, tantangan utama meliputi lamanya proses analisis kredit, ketidaklengkapan dokumen administrasi dari UKM, dan tingginya risiko kredit yang harus dikelola secara hati-hati. Sedangkan dari pihak UKM, kendala utama adalah keterbatasan administrasi usaha, rendahnya literasi keuangan, serta ketidakmampuan memenuhi persyaratan dokumen yang lengkap dan valid. Faktor eksternal ini berpengaruh besar terhadap lamanya proses persetujuan dan pencairan kredit, serta tingkat keberhasilan pengajuan kredit UKM.

3. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah kategori usaha yang berukuran kecil hingga menengah berdasarkan beberapa kriteria, seperti jumlah pekerja, aset, dan omzet. UKM mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian nasional karena dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memberikan kontribusi untuk inovasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Di Indonesia, UKM biasanya digolongkan sebagai sektor usaha yang memiliki karakteristik usaha berbasis keluarga, modal yang terbatas, dan skala operasi yang relatif kecil.